

INDEKS KERAWANAN PEMILU

PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LATAR BELAKANG

Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a:

“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”



DEFINISI DAN TUJUAN

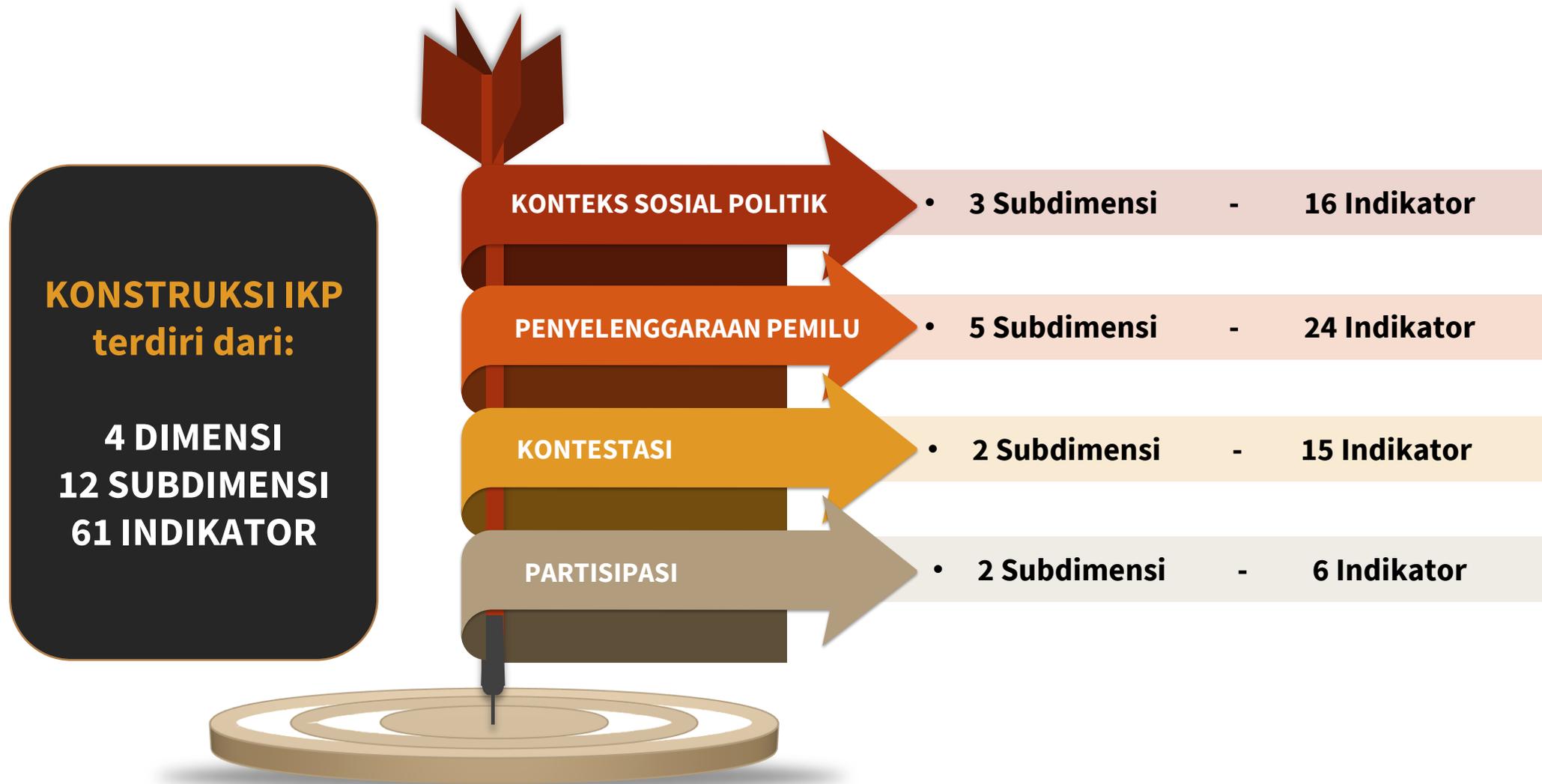
DEFINISI KERAWANAN PEMILU:

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan.
3. Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

KONSTRUKSI IKP



DIMENSI DAN SUB DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Keamanan
- Otoritas Penyelenggara Pemilu
- Otoritas Penyelenggara Negara



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Hak Memilih,
- Pelaksanaan Kampanye,
- Pelaksanaan Pemungutan Suara,
- Ajudikasi dan Keberatan Pemilu,
- Pengawasan Pemilu



KONTESTASI

- Hak Dipilih,
- Kampanye Calon



PARTISIPASI

- Partisipasi Memilih,
- Partisipasi Kelompok Masyarakat

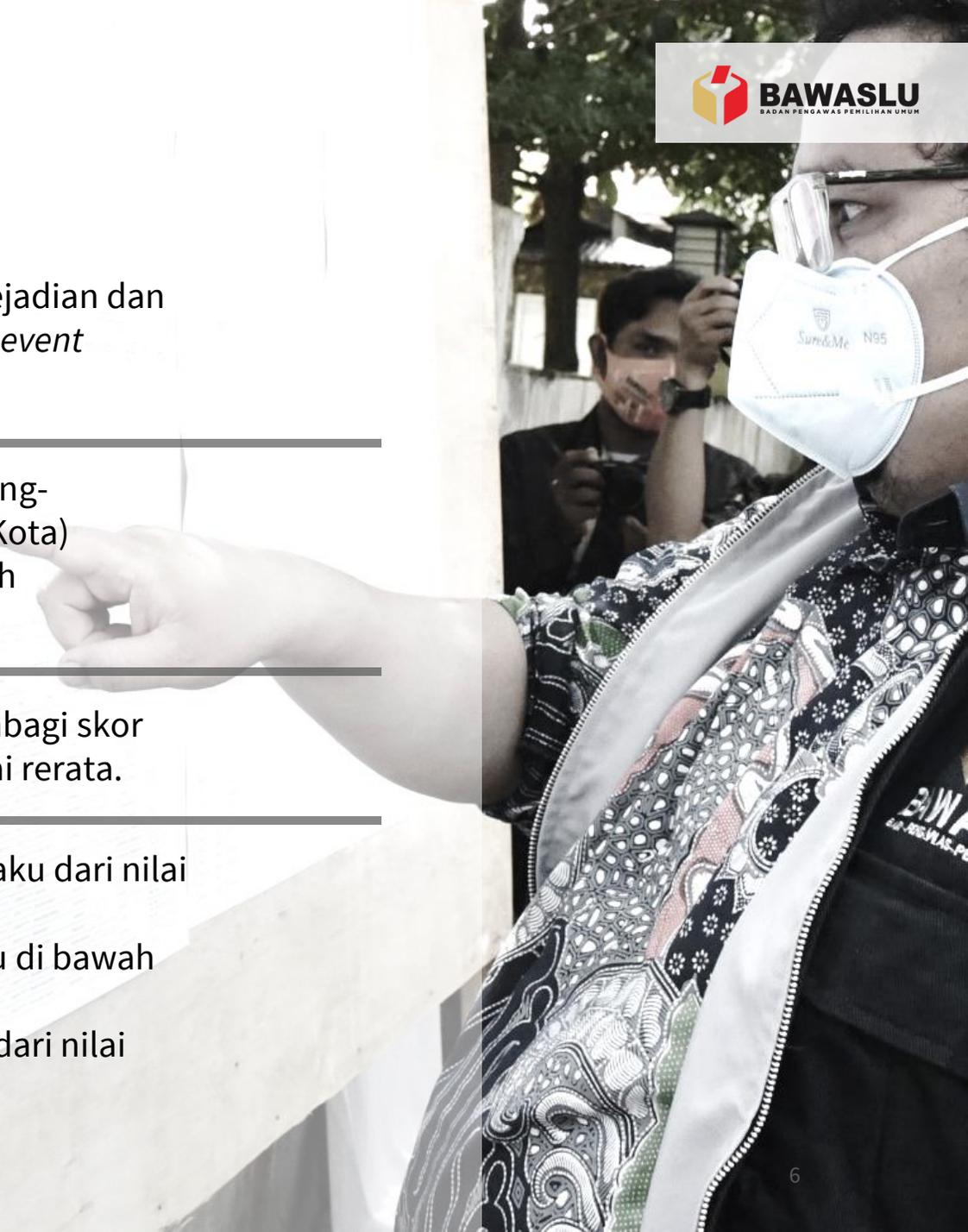
METODOLOGI

IKP dikonstruksi dari 61 indikator. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan *event* kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian.

Indikator penyusun dimensi diaggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi.

Kategorisasi untuk skor IKP dan skor per dimensi dihitung dengan membagi skor menjadi tiga bagian besar dengan *cut-off* satu simpangan baku dari nilai rerata.

- Skor dianggap rendah jika skor berada di bawah satu simpangan baku dari nilai rerata nasional variable.
- Skor dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata nasional.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada di atas satu simpangan baku dari nilai rerata nasional.





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) TINGKAT PROVINSI

TENTANG IKP PROVINSI

Ada dua analisa IKP Provinsi: berdasarkan hasil input data dari Bawaslu provinsi dan berdasarkan hasil agregat penghitungan kabupaten/kota

Berdasarkan hasil input data Bawaslu Provinsi merupakan data yang memang menunjukkan proses pemilu/pilkada di tingkat provinsi serta kewenangan yang dimiliki

Berdasarkan hasil agregat penghitungan kab/kota merupakan hasil yang diperoleh dari data input yang berasal dari kab/kota

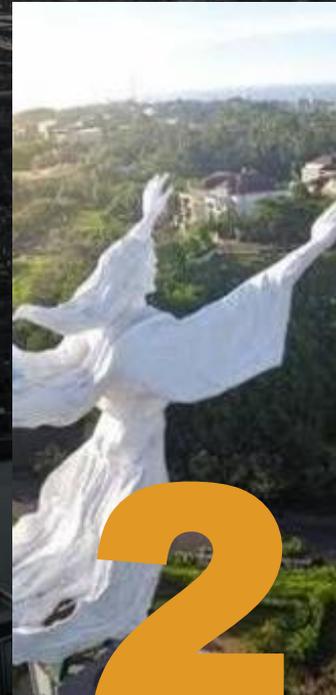
TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN TINGGI)

**RAWAN
TINGGI :**

**5 Provinsi
(15 Persen)**



1
DKI Jakarta
(88,95)



2
Sulawesi
Utara
(87,48)



3
Maluku Utara
(84,86)



4
Jawa Barat
(77,04)



5
Kalimantan
Timur
(77,04)

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN SEDANG)

RAWAN SEDANG :

21 Provinsi
(62 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	BANTEN	66.53
2	LAMPUNG	64.61
3	RIAU	62.59
4	PAPUA	57.27
5	NUSA TENGGARA TIMUR	56.75
6	SUMATERA UTARA	55.43
7	MALUKU	53.69
8	PAPUA BARAT	53.48
9	KALIMANTAN SELATAN	53.35
10	SULAWESI TENGAH	52.90
11	BALI	52.75

NO	PROVINSI	SKOR IKP
12	GORONTALO	45.44
13	SULAWESI BARAT	43.44
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43.02
15	KEPULAUAN RIAU	40.33
16	SUMATERA BARAT	39.68
17	SULAWESI TENGGARA	38.32
18	ACEH	38.06
19	SUMATERA SELATAN	35.07
20	JAWA TENGAH	34.83
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29.89

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN RENDAH)

RAWAN RENDAH :

8 Provinsi
(24 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KALIMANTAN UTARA	20.36
2	KALIMANTAN TENGAH	18.77
3	JAWA TIMUR	14.74
4	KALIMANTAN BARAT	12.69
5	JAMBI	12.03
6	NUSA TENGGARA BARAT	11.09
7	SULAWESI SELATAN	10.20
8	BENGKULU	3.79

KERAWANAN PROVINSI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Tinggi : 5 Provinsi (14.71%)
- Sedang : 22 Provinsi (64.71%)
- Rendah : 7 Provinsi (20.59%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 20 Provinsi (58.82%)
- Rendah : 8 Provinsi (23.53%)



KONTESTASI

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 19 Provinsi (55.88%)
- Rendah : 9 Provinsi (26.47%)



PARTISIPASI

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 28 Provinsi (82.35%)
- Rendah : 0 Provinsi (0 %)

10 PROVINSI RAWAN TINGGI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Maluku Utara (100)
- Sulawesi Utara (89,58)
- Papua (80,53)
- DKI Jakarta (78,27)
- Yogyakarta (75,87)
- Jawa Barat (74,91)
- Kalimantan Timur (72,70)
- Sumatera Utara (72,61)
- Papua Barat (72,33)
- Kalimantan Selatan (66,96)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Kalimantan Timur (100)
- Sumatera Utara (94,29)
- DKI Jakarta (92,36)
- Jawa Tengah (91,67)
- Sulawesi Utara (91,60)
- Banten (89,43)
- Maluku Utara (86,48)
- Jawa barat (83,38)
- Lampung (81,13)
- Sulawesi Tenggara (80,48)



KONTESTASI

- Maluku Utara (100)
- DKI Jakarta (96,09)
- Lampung (89,30)
- Jawa Barat (83,71)
- Bangka Belitung (79,10)
- Sulawesi Utara (73,96)
- Bali (71,32)
- Nusa Tenggara Timur (68,96)
- Gorontalo (65,65)
- Riau (62,96)

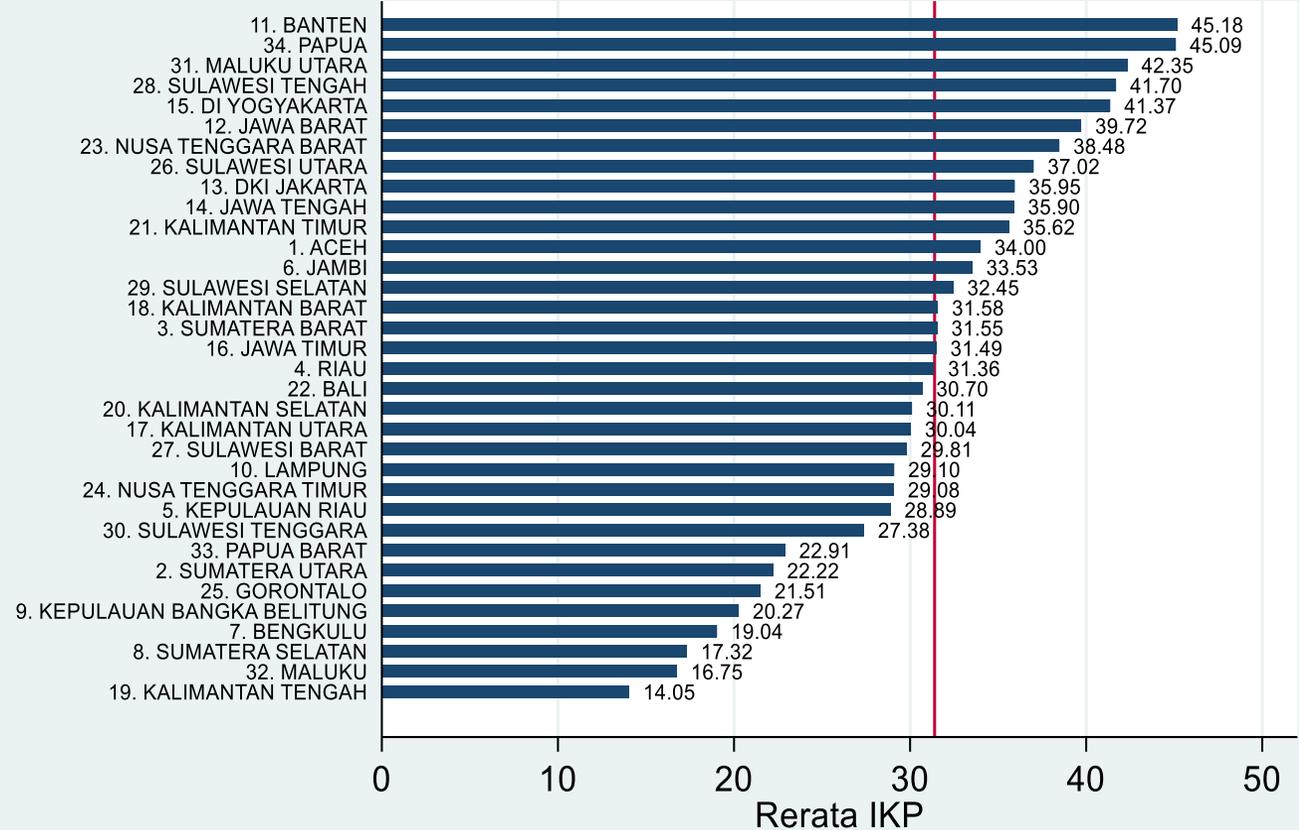


PARTISIPASI

- Sulawesi Utara (100)
- DKI Jakarta (87,01)
- Yogyakarta (87,01)
- Kepulauan Riau (87,01)
- Sulawesi Tengah (87,01)
- Papua (64,72)
- Jawa barat (42,07)
- Kalimantan Timur (30,92)

IKP PROVINSI TERTINGGI BERDASARKAN AGREGASI KAB/KOTA

1. Banten
2. Papua
3. Maluku Utara
4. Sulawesi Tengah
5. D.I. Yogyakarta
6. Jawa Barat
7. Nusa Tenggara Barat
8. Sulawesi Utara
9. DKI Jakarta
10. Jawa Tengah



IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI SOSIAL POLITIK

1. Sulawesi Utara
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Jambi
5. Sulawesi Tengah
6. Nusa Tenggara Barat
7. Sulawesi Barat
8. Sulawesi Selatan
9. Bali
10. Sulawesi Tenggara

IKP Dimensi Sosial Politik 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

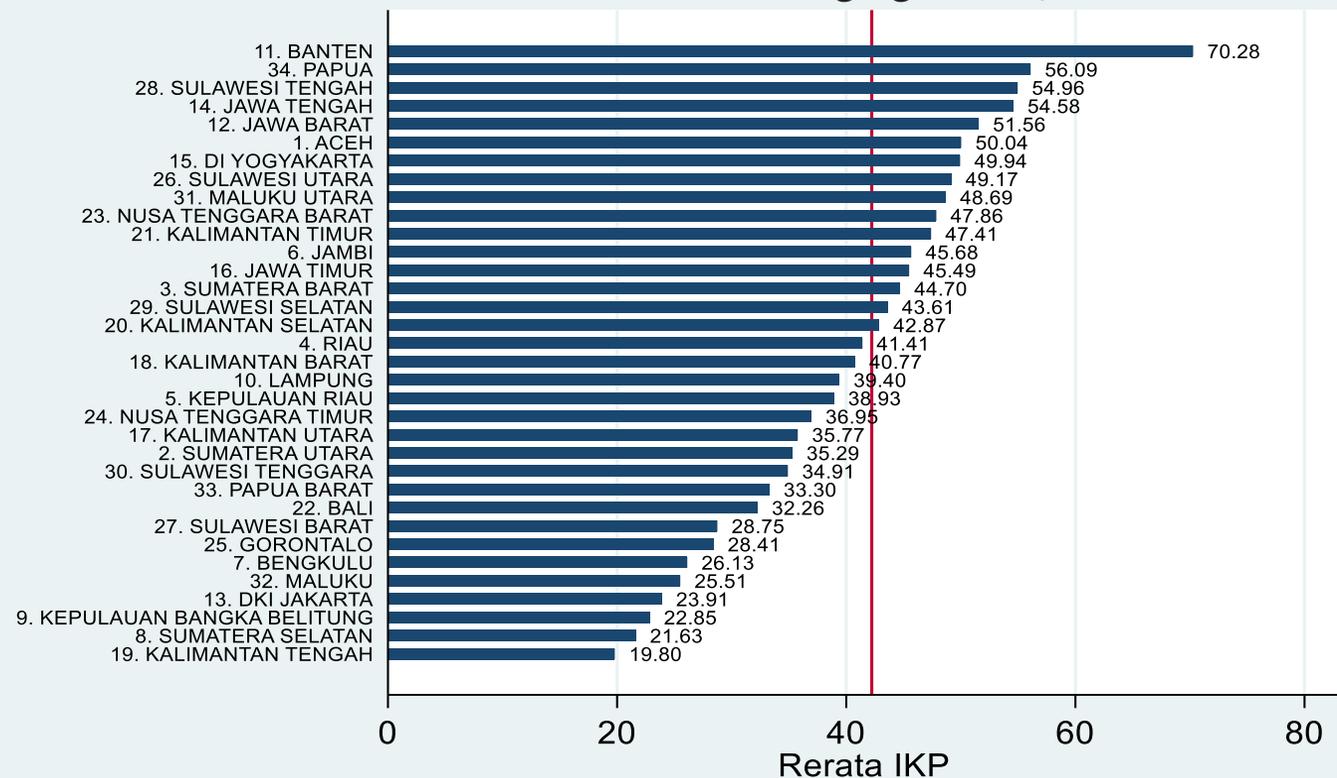


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Banten
2. Papua
3. Sulawesi Tengah
4. Jawa Tengah
5. Jawa Barat
6. Aceh
7. DI. Yogyakarta
8. Sulawesi Utara
9. Maluku Utara
10. Nusa Tenggara Barat

IKP Dimensi Penyelenggaraan Pemilu 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

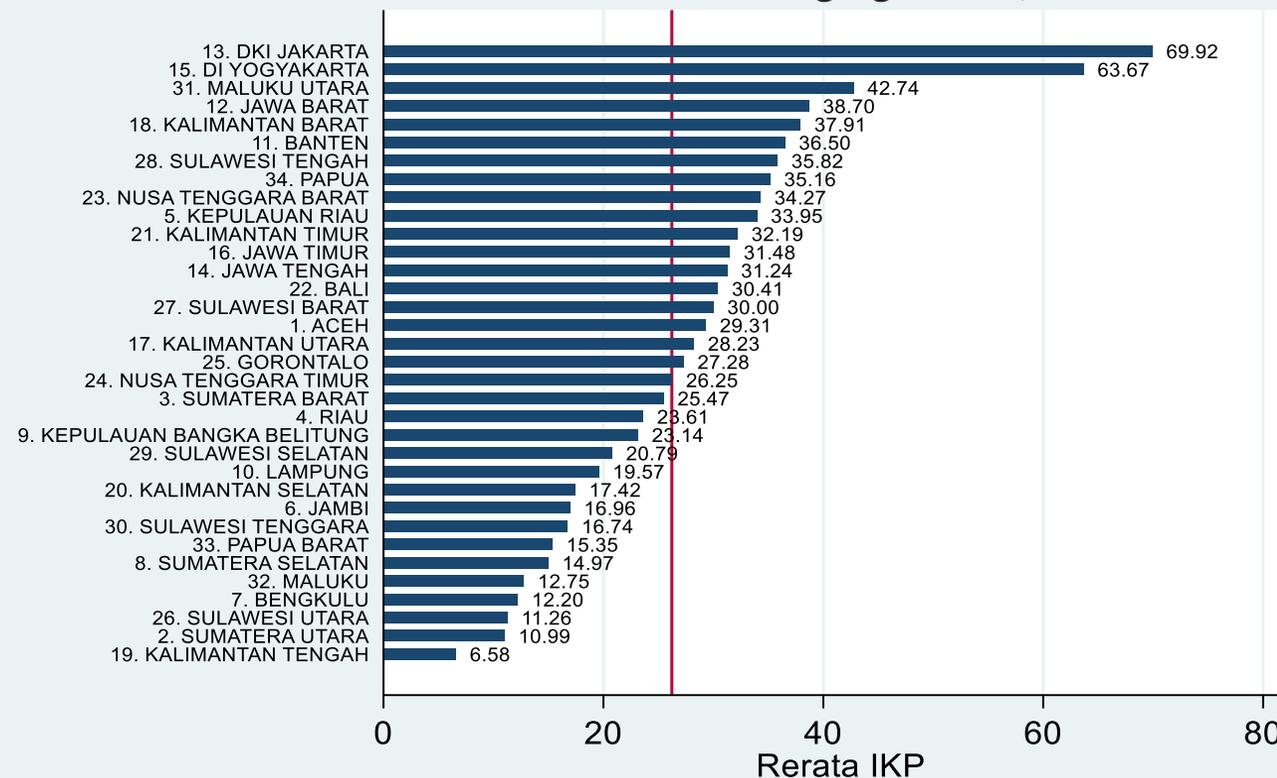


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI KONTESTASI

1. DKI Jakarta
2. DI. Yogyakarta
3. Maluku Utara
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Barat
6. Banten
7. Sulawesi Tengah
8. Papua
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kepulauan Riau

IKP Dimensi Kontestasi 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

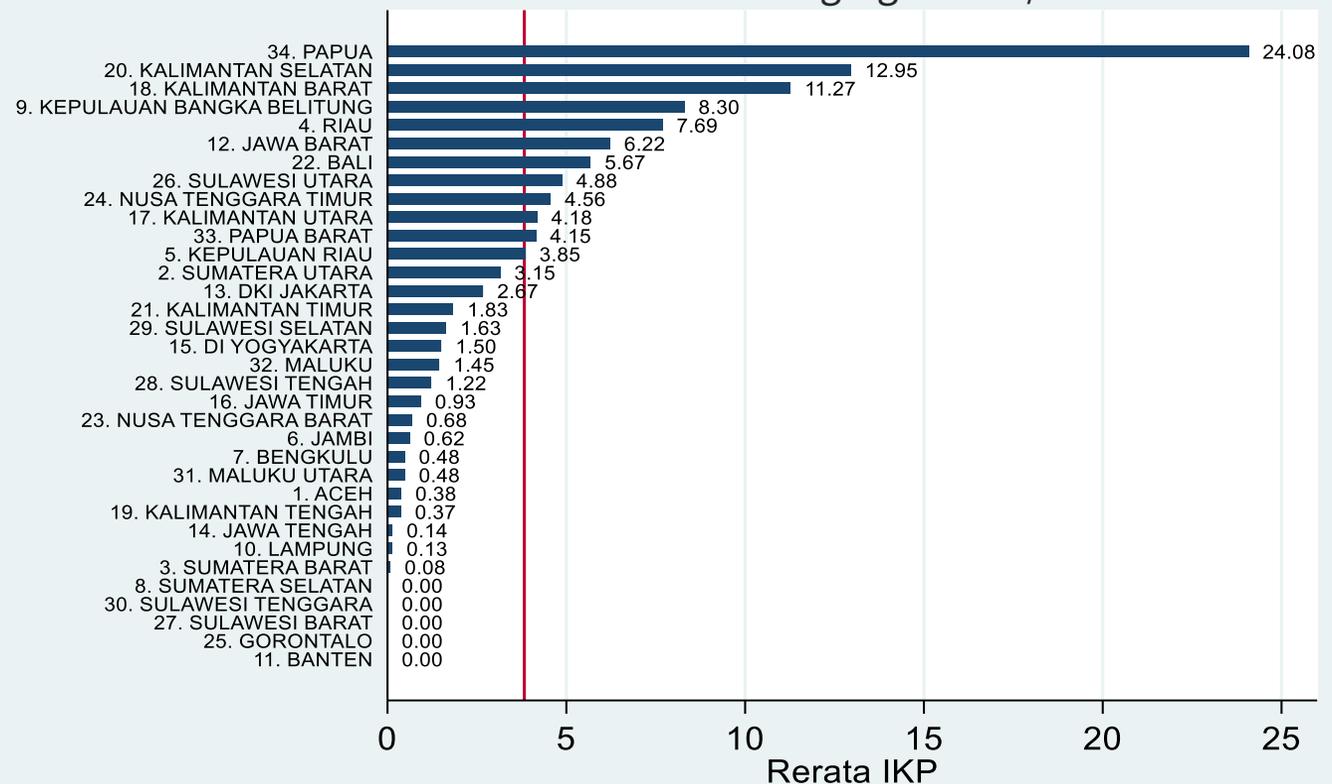


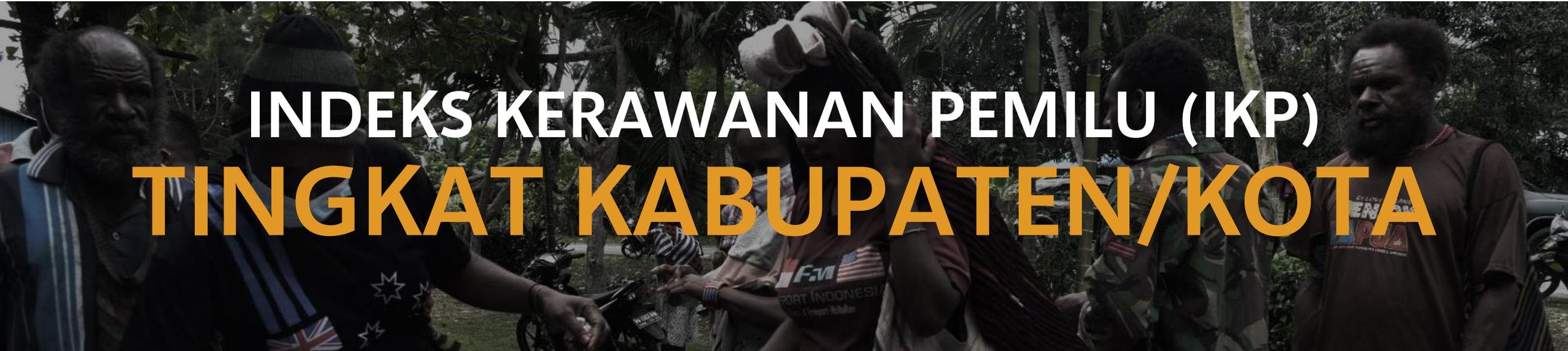
IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PARTISIPASI

1. Papua
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Barat
4. Kep. Bangka Belitung
5. Riau
6. Jawa Barat
7. Bali
8. Sulawesi Utara
9. Nusa Tenggara Timur
10. Kalimantan Utara

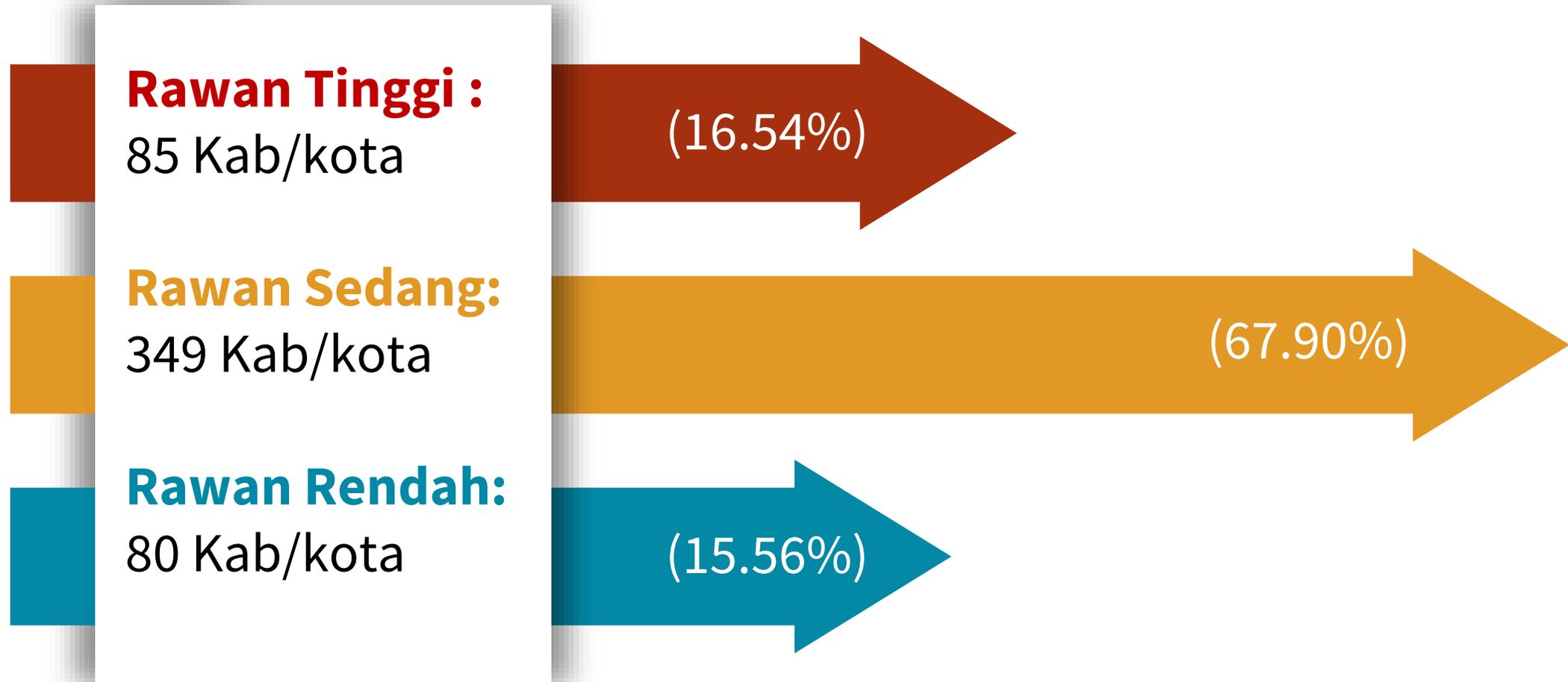
IKP Dimensi Partisipasi 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TINGKAT IKP KABUPATEN/KOTA



KERAWANAN KAB/KOTA PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- **Tinggi : 76**
Kab/kota (14.79%)
- **Sedang : 370**
Kab/kota (71.98%)
- **Rendah : 68**
Kab/kota (13.23%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- **Tinggi : 84**
Kab/kota (16.34%)
- **Sedang : 339**
Kab/kota (65.95%)
- **Rendah : 91**
Kab/kota (17.70%)



KONTESTASI

- **Tinggi : 95**
Kab/kota (18.48%)
- **Sedang : 419**
Kab/kota (81.52%)
- **Rendah : 0**
Kab/kota (0%)



PARTISIPASI

- **Tinggi : 30**
Kab/kota (5.84%)
- **Sedang : 484**
Kab/kota (94.16%)
- **Rendah : 0**
Kab/kota (0%)

KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KAB. INTAN JAYA	100	18	KAB. PURWOREJO	67.11	35	KAB. LOMBOK TENGAH	61.23	52	KAB. NABIRE	56.28	69	KAB. BANGGAI	52.66
2	KAB. JAYAWIJAYA	100	19	KAB. SIMEULUE	67.07	36	KAB. BATANG HARI	61.18	53	KAB. TUBAN	56.21	70	KAB. PASAMAN BARAT	52.66
3	KAB. BANDUNG	91.59	20	KAB. KOTABARU	65.52	37	KAB. MIMIKA	61.18	54	KAB. BOJONEGORO	55.76	71	KAB. KETAPANG	52.27
4	KAB. YALIMO	86.66	21	KAB. TASIKMALAYA	65.42	38	KAB. FAKFAK	61.04	55	KOTA BEKASI	55.48	72	KAB. SAMPANG	52.19
5	KAB. MAPPI	82.13	22	KOTA JAKARTA TIMUR	65.14	39	KAB. BANDUNG BARAT	59.93	56	KAB. MAMUJU	54.90	73	KAB. ALOR	51.83
6	KOTA BANJARBARU	80.14	23	KAB. KEPULAUAN YAPEN	64.93	40	KAB. MAMBERAMO TENGAH	59.68	57	KOTA PAREPARE	54.69	74	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	51.75
7	KAB. JAYAPURA	78.05	24	KAB. CIREBON	64.79	41	KAB. NIAS SELATAN	59.65	58	KAB. LAMPUNG TENGAH	54.65	75	KAB. KUTAI KARTANEGARA	51.49
8	KAB. PANDEGLANG	77.74	25	KAB. SLEMAN	64.56	42	KAB. NDUGA	59.55	59	KAB. SARMI	54.34	76	KOTA TASIKMALAYA	51.28
9	KAB. LABUHANBATU UTARA	76.29	26	KAB. HALMAHERA TENGAH	64.19	43	KAB. TEMANGGUNG	59.05	60	KAB. MAGELANG	54.25	77	KAB. PACITAN	51.17
10	KAB. MALAKA	76.03	27	KAB. MALANG	64.01	44	KAB. LEBAK	58.78	61	KAB. PASANGKAYU	54.21	78	KAB. KUNINGAN	51.10
11	KOTA TERNATE	75.30	28	KAB. AGAM	63.96	45	KOTA SUNGAI PENUH	58.67	62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	54.04	79	KAB. KONAWA SELATAN	50.68
12	KOTA SEMARANG	73.26	29	KAB. KEDIRI	63.40	46	KAB. WONOSOBO	58.35	63	KOTA SERANG	53.32	80	KAB. CIANJUR	50.65
13	KAB. TOLIKARA	72.51	30	KAB. PUNCAK	63.23	47	KAB. ACEH SELATAN	57.75	64	KAB. KENDAL	53.25	81	KOTA KOTAMOBAGU	50.65
14	KAB. SUKOHARJO	70.20	31	KAB. BULUKUMBA	63.19	48	KAB. SUMBA TIMUR	57.52	65	KAB. BANYUASIN	53.19	82	KAB. KUTAI BARAT	50.33
15	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	67.72	32	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	63.03	49	KAB. KERINCI	57.42	66	KAB. NAGAN RAYA	53.03	83	KAB. MUNA	49.91
16	KAB. LOMBOK TIMUR	67.57	33	KOTA BANDAR LAMPUNG	62.90	50	KOTA JAYAPURA	56.64	67	KAB. SEKADAU	52.78	84	KAB. ASMAT	49.47
17	KAB. MAJALENGKA	67.14	34	KAB. PIDIE	61.80	51	KAB. SIGI	56.38	68	KAB. WAKATOBI	52.73	85	KAB. JENEPONTO	49.38

PENGARUH KERAWANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DALAM IKP

PENGARUH KERAWANAN DALAM IKP

PROVINSI

- **Penyelenggaraan Pemilu** adalah dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 46,55 kemudian **Kontestasi** dengan skor 40,75 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 17,23.

KABUPATEN/KOTA

- **Penyelenggaraan Pemilu** juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 42,22 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 31,13 kemudian **Kontestasi** dengan skor 26,22 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 3,83.

ISU STRATEGIS 1

- 1. Netralitas Penyelenggara Pemilu:** polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menajada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.
- 2. Pelaksanaan Tahapan di provinsi baru.** Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara Pemilu.



ISU STRATEGIS 2

3. **Potensi Polarisasi Masyarakat.** Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
4. **Mitigasi dampak penggunaan media sosial.** Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
5. **Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih.** Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH